

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek merupakan suatu lembaga keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga dan beredar. Bursa efek ini berfungsi untuk menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Bursa Efek Indonesia (*Indonesia Stock Exchange*) adalah pasar modal di Indonesia, yang merupakan gabungan dari dua bursa efek yakni, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penggabungan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi daya saing di kawasan regional.

Jumlah perusahaan yang *go public* mengalami peningkatan yang signifikan, dilihat dari jumlah emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga Desember 2012 sebanyak 451 emiten. Saham-saham ini diperdagangkan untuk menarik para investor menanamkan modal pada emiten yang terdaftar sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan bisnis mereka. Bagi investor, memilih investasi di Bursa Efek Indonesia dapat memperlihatkan nilai investasi mereka mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini tercermin dari peningkatan harga saham investasi yang mencapai *capital gain*. Industri perbankan adalah suatu industri yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup orang banyak (www.bi.go.id).

Perusahaan perbankan, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang finansial dan menjalankan fungsi intermediasi dimana satu pihak mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan di lain pihak dana yang berhasil dikumpulkan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Investasi pada saham perusahaan perbankan termasuk cukup berisiko karena jenis perusahaan ini rentan terhadap kondisi perekonomian pada umumnya.

Industri perbankan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan sektor industri lain dilihat dari beberapa karakteristik utama yang dimilikinya. Karakteristik pertama adalah industri yang padat akan regulasi dan yang kedua adalah industri ini merupakan industri yang berbasis kepada kepercayaan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi, sehingga bank harus mengelolanya dengan baik dan *prudential* serta dituntut untuk transparansi dalam penyampaian laporan keuangan. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*” (KNKG, 2004).

Semakin kompleksnya resiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik *good corporate governance* oleh perbankan , pelaksanaan *good corporate governance* ditujukan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Bank Indonesia mengagas peraturan mengenai ketentuan pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum di peraturan bank Indonesia No.8/4/PBI/2006.

Pada dasarnya klasifikasi bank di Indonesia terdiri atas tiga jenis, yaitu Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya, seperti kliring dan inkaso.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Kelangsungan hidup suatu perusahaan baik yang BUMN, BUMD maupun BUMS sangat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan. Tata Kelola perusahaan yang kurang baik dapat menimbulkan penyimpangan di kalangan pengelola perusahaan, direksi atau manajemen yang dilakukan oleh pemegang saham maupun karyawan. Penyimpangan terjadi karena adanya kepentingan pribadi

tingkat atas dalam mengelola perusahaan yang memudahkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Konsep ini menekankan pada dua hal pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.

Tanpa peranan GCG, bisnis perbankan akan seperti kondisi di awal tahun 1998. Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada saat itu bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktik GCG di kalangan perbankan. Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktik manajemen risiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional (www.banking.blog.gunadarma.ac.id,2010).

Prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) dibutuhkan dalam pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR), karena implementasi dari tanggung jawab perusahaan tidak terlepas dari penerapan GCG di dalam perusahaan yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggungjawab sosialnya. Untoro (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tidak semua perusahaan mau dan mampu untuk melaksanakan CSR karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan erat dengan moral etika bisnis. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran para pelaku bisnis bahwa CSR merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya.

Perkembangan CSR tidak terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) yang direkomendasikan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Bentuk CSR telah berkembang hebat dengan banyak variasi. Contoh bentuk CSR yang sering dilakukan antara lain adalah konsentrasi pada

kesejahteraan pegawai, kontribusi dalam dunia pendidikan, bantuan-bantuan untuk bencana alam, keikutsertaan dalam pembangunan fisik sarana umum, kontribusi dalam dunia kesehatan, dan lain-lain.

Di Indonesia, CSR sudah mulai banyak diterapkan pada perusahaan dan diatur didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sedangkan peraturan mengenai pengungkapan atau *disclosure* itu sendiri diatur dalam keputusan BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996. Pengungkapan sukarela muncul karena adanya kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar, karena keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari perolehan laba saja, tetapi juga ditentukan oleh keperdulian perusahaan terhadap masyarakat. Dalam keputusan menteri BUMN kep-236/MBU/2003 tentang program bina lingkungan yang mengharuskan perusahaan menyisihkan laba sebesar 1-3% untuk program tersebut.

Bank Indonesia mencatat adanya peningkatan laba bersih bank BUMN akhir 2013. Total laba bank milik negara tersebut pada 2013 tercatat mencapai Rp48,762 triliun, naik Rp7,939 triliun atau 19,44 persen dari posisi 2012 sebesar Rp40,823 triliun (ekonomi.okezone.com,2013). Sejalan dengan besarnya laba yang didapat maka akan semakin besar juga dana CSR yang akan dialokasikan tetapi kenyataannya dana CSR di bank BUMN banyak disalahgunakan.

Pusat pelaporan dan analisis keuangan (PPATK) menjelaskan bahwa pada saat ini banyak dana bantuan sosial pemerintah oleh perusahaan BUMN khususnya di sektor perbankan, dana ini kerap digunakan untuk kepentingan partai politik ataupun calon legislatif. Untuk perbankan sendiri biasanya dana CSR dikelompokkan untuk kelompok-kelompok tertentu. Penyelewengan dana CSR bisa dilakukan oleh jajaran komisaris karena komisaris yang akan mengusulkan dana CSR perusahaan akan diberikan kepada kelompok yang memiliki afiliasi kepada partai politik ataupun politisi tertentu. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana CSR, maka kontrol dari komisaris harus tepat (www.kompas.com 2013)

Masih banyak bank yang belum melaksanakan praktik CSR dengan benar dan mendalam. Pengungkapan CSR pun biasanya dilaporkan dengan sangat singkat,

tidak berimbang, dan tidak melaporkan isu-isu yang material. Hal tersebut dikarenakan oleh masih banyak perusahaan yang belum mengerti bagaimana menciptakan program atau produk yang mampu membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Terdapat tiga hal penting yang bisa dilakukan perusahaan perbankan untuk menerapkan program CSR, yaitu dalam pengambilan keputusan investasi, dalam melakukan pengajaran kemampuan *financial literacy* dan dalam membuat pool khusus untuk usaha mikro dan kecil (www.infobanknews.com, 2011).

Mekanisme GCG diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan GCG didalam perusahaan. Mekanisme GCG merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme GCG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada organ-organ perusahaan yang bertugas sebagai pengawas yang terdiri dari dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Berdasarkan pedoman GCG di Indonesia, secara hukum dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Fungsi pengawasan ini diperkuat dengan adanya dewan komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris, karena dewan komisaris independen berasal dari pihak yang tidak terafiliasi sehingga lebih bersifat independen dalam pengawasan. Adanya pengawasan ini dapat menjamin bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (investor) dan semua informasi yang dimiliki perusahaan akan diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk juga informasi tentang pengungkapan CSR (Untoro, 2013). Pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite. Salah satunya adalah komite audit. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam aspek pengendalian/pengawasan perusahaan sehingga keberadaan komite audit akan dapat meningkatkan kualitas laporan dan pengungkapan (Untoro,2013).

Ukuran perusahaan dapat memengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan. Perusahaan pada dasarnya mengungkapkan informasi sosial termasuk CSR dengan tujuan membangun *image* perusahaan dan mendapat

perhatian masyarakat. Perusahaan besar yang menjadi perhatian masyarakat akan cenderung diawasi dan kemudian lebih banyak mengungkapkan informasi CSR dibandingkan dengan perusahaan kecil (www.web2.bisnis.com, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai variabel dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* masih ditemukan *research gap* atau inkonsistensi pada hasil penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan Priananta dan Yustian (2011) serta Perwira dan Hadiprajitno (2013) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priantinah dan Nur (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil yang berbeda dinyatakan oleh Ramdaningsih dan Utama (2013) bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Perwira dan Hadiprajitno (2013) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa elemen *corporate governance* sebagai variabel independen yaitu, dewan komisaris independen terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Penelitian serupa dilakukan oleh Cahyaningsih dan Martina (2011), Untoro dan Zulaikha (2013) namun penelitian ini menunjukkan hasil bahwa komposisi dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Susanti dan Riharjo (2013) dalam penelitiannya menunjukkan komite audit memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Priananta dan Yustian (2011), Perwira dan Hadiprajitno (2013) yang hasil penelitiannya menunjukkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Pengaruh ukuran perusahaan dengan pengungkapan CSR dalam penelitian Cahyaningsih dan Martina (2011) menunjukkan hubungan kedua variabel ini berpengaruh tetapi tidak signifikan. Tetapi penelitian oleh Mutia, Zuraida dan Andriani (2011) serta priantinah dan Nur (2012) menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel ini adalah negatif dan tidak signifikan.

Dengan banyaknya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya serta objek penelitian yang beragam membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Objek penelitian penulis adalah perusahaan perbankan di BEI. Pemilihan sektor perbankan dilakukan dengan pertimbangan masih ditemuinya penerapan *Corporate Governance* yang buruk di perusahaan perbankan terkait dengan penggunaan dana CSR, dan pengungkapan CSR pada perbankan masih sangat singkat, tidak berimbang, dan tidak melaporkan isu-isu yang material.

Berdasarkan uraian, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *good corporate governance* (dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit), ukuran perusahaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012?
2. Bagaimana pengaruh mekanisme *good corporate governance* (dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit), dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012?
3. Bagaimana pengaruh mekanisme *good corporate governance* (dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit), dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dibuat maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris mengenai:

1. Untuk menganalisis mekanisme *good corporate governance* (dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit), ukuran perusahaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan mekanisme *good corporate governance* (dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit) dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012.
3. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme *good corporate governance* (dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audit) dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012 secara parsial.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya sebagai dasar pemikiran atau bahan studi perbandingan dan merupakan media referensi untuk penelitian sejenis mengenai *corporate governance* dan *corporate social responsibility*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan perbankan di BEI diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak perusahaan dan dapat menjelaskan mengenai praktik *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*, sehingga dapat meningkatkan penerapan praktik *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*.
2. Bagi investor diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* yang terjadi di

perusahaan perbankan dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan perbankan .

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang Rangkuman teori, penelitian terdahulu sejenis, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, variabel operasional penelitian yang digunakan, tahap penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang diberikan berkaitan dengan penelitian ini dan saran yang akan diberikan.